

TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA SUNGAI PINANG)

Retni Pratiwi^{1*}, Riki Ruspianda²

^{1,2}Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuantan Singingi

Email Korespondensi: retnipratiwi23@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi terpenting yang menjadi kunci dari pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Pengembangan pariwisata desa merupakan salah satu agenda Pemerintah dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri. Program desa dapat menggali potensi yang dikembangkan khususnya dibidang keparawisataan. Keberadaan sumberdaya manusia tidak hanya menjadi penikmat dari objek wisata namun diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan serta pemeliharaan objek wisata dengan tujuan yaitu pariwisata berkelanjutan. Desa Sungai Pinang merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki Objek wisata dengan karakteristik yang unik. Karakteristik tersebut berupa air panas yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat pada desa lain di Kecamatan Hulu Kuantan tersebut. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan maupun daerah tujuan wisata pada masa kini, sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa di masa yang akan datang. Metode penelitian ini dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tantangan sumberdaya manusia dalam proses menuju pariwisata yang berkelanjutan pada objek wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang ini masih sangat besar. Hal ini dapat dilihat pada aspek pariwisata berkelanjutan yaitu partisipasi, keikutsertaan para pelaku/stakeholder involvement, kepemilikan lokal, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan dan promosi yang masih terkendala pada aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Harapan untuk pengembangan objek wisata ini adanya keputusan yang jelas terkait pihak pengelola, dengan tujuan pihak pengelola mendapatkan akses informasi mengenai bantuan pendanaan pengembangan pariwisata, pelatihan dan hal terkait lainnya.

Kata Kunci: Sumberdaya Manusia, Pariwisata Berkelanjutan, Pengembangan Desa

ABSTRACT

Tourism as one of the most important economic activities that is the key to development, prosperity, and welfare. Village tourism development is one of the Government's agendas in an effort to realize an independent village. Village programs can explore the potential developed, especially in the field of tourism. The existence of human resources is not only a connoisseur of tourist attractions but is expected to participate in the development and maintenance of tourist objects with the aim of sustainable tourism. Sungai Pinang Village is the only village in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency that has tourist attractions with unique characteristics. This characteristic is in the form of hot water that is formed naturally and is not found in other villages in Hulu Kuantan District. Sustainable tourism is tourism that can meet the needs of tourists and tourist destinations today, while protecting and encouraging similar opportunities in the future. This research method is descriptive qualitative. The results of the study show that the challenge of human resources in the process towards sustainable tourism in the Hot Spring attraction of Sungai Pinang Village is still very large. This can be seen in the aspects of sustainable tourism, namely participation, participation of actors/stakeholders involvement, local ownership, sustainable use of resources, accommodating community goals, carrying capacity, monitoring and evaluation, accountability, training and promotion which are still constrained in aspects of quantity and quality of human resources. The hope for the development of this tourist attraction is a clear decision related to the management, with the aim of the management getting access to information about funding assistance for tourism development, training and other related matters.

Keywords: Human Resources, Sustainable Tourism, Village Development

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi suatu negara. Pariwisata adalah salah satu kegiatan ekonomi terpenting dan dianggap sebagai salah satu kunci dari pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan (Bayih dan Singh, 2020). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan realisasi devisa dari sektor pariwisata tahun 2019 mencapai Rp 280 triliun. Sektor Ekonomi bidang pariwisata berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 5,5 %. dengan penyerapan angkatan kerja sekira 13 juta orang (Kontan.co.id, 2020).

Pengembangan pariwisata desa merupakan salah satu agenda Pemerintah dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri. Melalui program ini setiap desa dapat menggali potensi yang mungkin untuk dikembangkan khususnya dibidang keparawisataan. kemudian, dengan tergalinya potensi tersebut secara bertahap membawa desa kepada kemandirian. Pada pengembangan pariwisata desa, keberlanjutan merupakan hal penting untuk dicapai, dalam hal ini salah satunya adalah di sector ekonomi. Banyak pihak yang harus terlibat aktif dalam proses pengembangan objek wisata di suatu Desa yaitu pemerintah setempat, masyarakat, pihak swasta serta pengunjung/wisatawan. Keberadaan sumberdaya manusia tidak hanya menjadi penikmat dari objek wisata namun diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan serta pemeliharaan objek wisata dengan tujuan akhir yaitu pariwisata berkelanjutan.

Menurut Nawawi (2001) terdapat 3 pengertian dari sumberdaya manusia yaitu :

- a. Sumberdaya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
- b. Sumberdaya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumberdaya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Desa Sungai Pinang merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki Objek wisata dengan karakteristik yang unik. Karakteristik tersebut berupa adanya air panas yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat pada desa lain di Kecamatan Hulu Kuantan tersebut. Objek wisata tempat pemandian air panas ini baru saja diresmikan oleh oleh Bupati Kuantan Singingi pada tanggal 03 Maret 2021 yang lalu.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Dalam mencapai tujuan ini perlu adanya analisis terkait peranan sumberdaya manusia dalam proses pengembangan objek wisata pemandian air panas di Desa Sungai Pinang dengan tetap memperhatikan indikator dari pariwisata yang berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan maupun daerah tujuan wisata pada masa kini, sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa di masa yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan

mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, proses ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan (United Nation World Tourism Organisation–UNWTO).

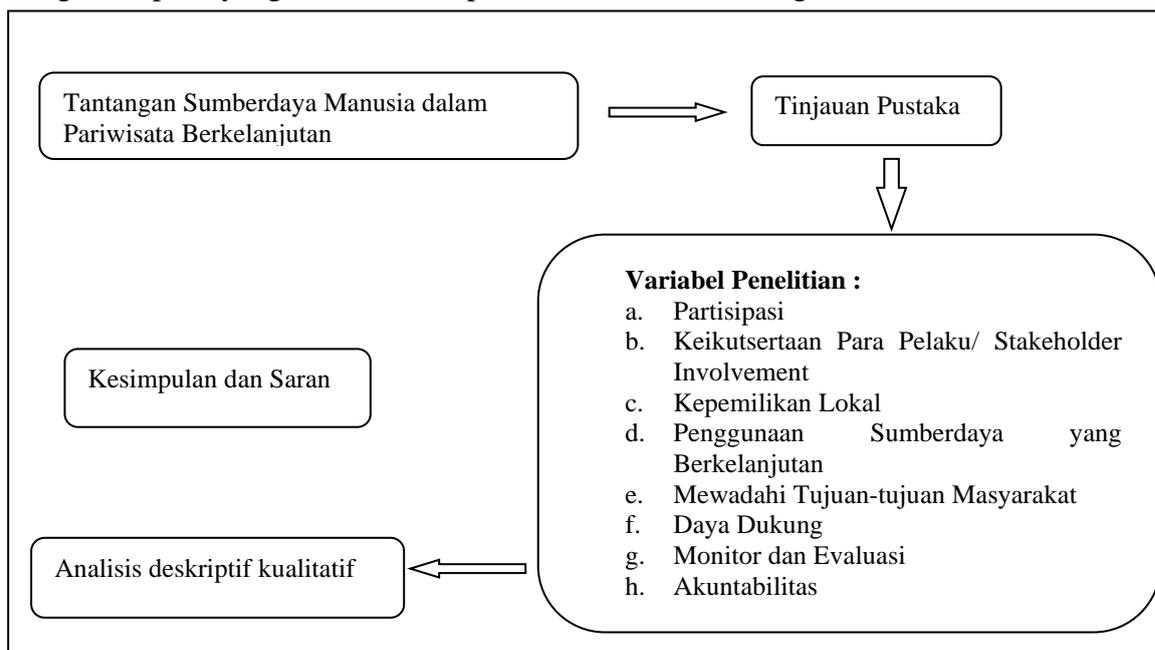
Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai Tantangan Sumberdaya Manusia Dalam Pariwisata Berkelanjutan Studi Kasus Wisata Tempat Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan proses pengembangan objek wisata pemandian air panas Desa Sungai Pinang menuju pariwisata yang berkelanjutan dalam persepektif sumberdaya manusia.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini adalah Objek Wisata Tempat Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dasar dengan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat (Darjosanjoto,2012). Adapun fenomena yang dilihat dalam penelitian ini yaitu fenomena, aktivitas maupun tingkah laku yang terjadi berkenaan dengan pariwisata berkelanjutan dengan perspektif sumberdaya manusia.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini akan memaparkan hasil temuan berupa Pariwisata desa yang berkelanjutan dengan perspektif sumberdaya manusia.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Adapun kerangka berpikir yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan individu/pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki interaksi/keterkaitan dengan seluruh komponen pariwisata. SDM pariwisata memegang peranan penting dalam menggerakkan roda industri ini. Dengan memiliki SDM pariwisata yang memiliki kompetensi yang baik, maka pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang di hadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan-tantangan ini mencakup keusangan karyawan, perubahan-perubahan sosioteknis dan perputaran tenaga kerja. Kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan departemen personalia dalam mempertahankan sumber daya manusia yang efektif (Handoko, 2008:117).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. "Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat".

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai „resep“ pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

a. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuantujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam suatu kebijakan ataupun program kegiatan. Masyarakat yang awalnya acuh tak acuh mulai memahami dan mulai berperan serta ikut serta dalam pengelolaan Desa wisata. Yaitu salah satunya masyarakat ikut berperan dalam pembentukan suatu wadah yang mengelola Desa wisata di Kelurahan mereka. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya tahap implementasi, tetapi menyeluruh, mulai tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaata hasil-hasilnya. Berkaitan dengan pengelolaan Desa

wisata, maka peran serta pihak-pihak sangat relevan dan dibutuhkan untuk berpartisipasi baik berupa sasaran pikiran, tenaga, dana dan lain-lain.

Sampai pada saat ini kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata pemandian air panas ini adalah Suku Piliang Soni. Bentuk partisipasi dari Suku Piliang Soni ini berupa kegiatan pemeliharaan dan perawatan objek wisata. Orang yang melakukan perawatan dan pemeliharaan langsung ditunjuk oleh ninik mamak suku piliang soni. Meskipun atas nama suku piliang soni tetapi tidak semua anggota suku tersebut terlibat. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya pengunjung yang berwisata ke Pemandian air panas ini yang menyebabkan belum membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Disisi lain, Pemerintah Desa Sungai Pinang juga ikut berpartisipasi dalam bentuk membuka akses jalan diawal pengembangan objek wisata, kemudian jalan tersebut diperlebar dengan bantuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengenai strategi pengembangan objek wisata pemandian air panas ini, yang terlibat adalah suku piliang soni dan masyarakat desa Sungai Pinang. Suku ini berharap objek wisata ini dapat berkembang sesuai rencana yang dibuat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi proses pengembangan objek wisata Pemandian Air Panas ini dikarenakan masih terbatasnya kapasitas kelompok masyarakat Suku Piliang Soni tersebut dalam hal pengelolaan objek wisata. Kapasitas yang dimaksud adalah terkait pengetahuan serta wawasan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata sampai dengan strategi promosi objek wisata. Masalah ini dapat diatasi dengan beberapa cara antara lain yaitu dengan mengikutsertakan beberapa orang dari pengelola objek wisata (Suku Piliang Soni) untuk mengikuti pelatihan terkait kepariwisataan yang diadakan oleh instansi terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Solusi lainnya yaitu kelompok masyarakat pengelola (Suku Piliang Soni) berkolaborasi dengan masyarakat lainnya serta dibantu oleh pemerintah desa setempat untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan tujuan membentuk suatu komunitas yang memiliki kesamaan visi dalam hal pengembangan objek wisata.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang telah sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat terkait. Akan tetapi dalam penerapan prinsip tersebut masih terkendala beberapa permasalahan, yakni terkait kegiatan desa wisata yang hanya diikuti anggota masyarakat tertentu, komunitas lokal belum seluruhnya diikutsertakan, masyarakat desa wisata yang cenderung pasif dalam berpartisipasi, generasi muda yang juga tidak terlalu dilibatkan, hingga terkait rendahnya upaya pengawasan kegiatan desa wisata oleh masyarakat.

Dalam pengembangan wisata hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep pengembangan ekowisata yang melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat (*community-based ecotourism*) pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi obyek dan daya tarik ekowisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan seperti penginapan, pemandu wisata, penyediaan cinder mata khas yang berasal dari budaya dan flora dan fauna setempat, dan lain-lain.

Dalam konteks partisipasi masyarakat lokal, untuk masyarakat Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang memiliki jenis partisipasi spontan. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal yang menetap di daya tarik wisata tersebut memiliki tipologi aktor utama-internal yang artinya menjadi pelaku utama sebagai penyelenggara praktik pariwisata. Sedangkan untuk masyarakat lokal memiliki jenis partisipasi terdorong dengan tipologi aktor umum-kuasi internal yang artinya telah memiliki kesadaran serta spirit keterlibatan dalam penyelenggaraan pariwisata di wilayah mereka tinggal. Untuk jenis partisipasi terpaksa dimiliki oleh masyarakat lokal. Tipologi sebagai aktor yang umum-kuasi

eksternal menyebabkan keterlibatan mereka dalam pariwisata yang diselenggarakan di wilayahnya menjadi kurang intens.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk perencanaan berisi tentang dukungan terhadap gagasan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ternyata, masyarakat lokal menjadi bagian penting dari pembangunan pariwisata. Apabila masyarakat lokal mendukung dalam pembangunan, hampir dapat dipastikan prosesnya akan berjalan lancar. bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat lokal harus didukung secara finansial untuk berinvestasi dalam pengembangan pariwisata
- 2) Masyarakat lokal berperan penting sebagai enterpreneur
- 3) Masyarakat lokal harus dilibatkan saat pembuatan kebijakan tentang pariwisata
- 4) Masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
- 5) Masyarakat harus punya suara saat proses pengambilan keputusan.

Bentuk partisipasi yang paling diharapkan oleh mereka yaitu tentang pelibatan mereka saat pembuatan kebijakan tentang pariwisata. Mereka beranggapan bahwa dengan keterlibatannya akan memberi pandangan lain dari seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan tersebut. Pandangan dari mereka akan melengkapi kebijakan yang sudah disusun oleh pihak pemerintah. Sehingga akan tercipta keselarasan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (Thetsane, 2019) sementara itu, Ratnaningsih dan Mahagangga (2015) menambahkan bahwa bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti pembentukan lembaga seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Lembaga ini terbentuk karena adanya hasil musyawarah yang telah dilakukan antara masyarakat dengan pihak desa. Dalam kegiatan musyawarah tersebut, hasil yang didapat yaitu membuat keputusan tentang pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. Mereka percaya dengan musyawarah akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata.

Salah satu bentuk partisipasi ini dimulai dari proses pencairan pendanaan. Pencarian dana dilakukan dalam bentuk pengajuan dan pengawalan proposal ke berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Selanjutnya, dana yang didapat dikelola secara swakelola untuk pembangunan fasilitas (Kaharuddin et al, 2020). Sementara itu, Ira dan Muhammad (2019) mengatakan bahwa bentuk lain partisipasi masyarakat lokal dalam proses pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah dengan terlibat langsung pada usaha-usaha pariwisata yang dilakukan lewat lembaga Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis mengelola usaha pariwisata seperti humas, pemasaran, kafe, dan live in. Keberhasilan pengelolaan dapat dilihat melalui peningkatan jumlah wisatawan yang datang.

b. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Komposisi stakeholder pariwisata yang berada di Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang terdiri dari empat komponen, yaitu: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), masyarakat lokal, investor, dan Pemerintah.. alam proses pengembangan objek wisata ini kedepannya sudah ada beberapa stakeholder yang terlibat seperti dari institusi pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Riau. Adapun bentuk partisipasinya yaitu dalam hal penelitian terhadap objek wisata. Sejauh ini sudah ada beberapa universitas yang melaksanakan penelitian pada objek wisata ini. Dalam pembangunan fisik objek wisata ini juga dibantu oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Peran pelaku lain dalam pengembangan pariwisata Kota Semarang melibatkan bisnis agen wisata Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Asosiasi bisnis lainnya yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Pembangunan fisik objek wisata ini terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2006/2007 berupa penggalian dan pembuatan sumur sumber mata air panas. Selanjutnya tahap kedua pada tahun 2010 dilakukan pembangunan fisik berupa ruang ganti, toilet dan beberapa pembangunan fisik lainnya. Selanjutnya pada tahun 2019/2020 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali melakukan pembangunan fisik berupa pembangunan areal pemandian dan kolam renangnya. Pembangunan areal pemandian berukuran 15 x 40 m dan pembangunan kolam sebanyak 2 buah. Kolam renang yang dibangun tersebut masing-masing berukuran 4 x 8 m dengan kedalaman untuk dewasa dan untuk anak-anak berbentuk lingkaran dengan diameter 2 m.

Penerapan prinsip keterlibatan segenap pemangku kepentingan dalam Good Tourism Governance (Sunaryo, 2013:78) belum optimal melihat keaktifan dan sinergitas pemangku kepentingan belum sepenuhnya terwujud. Penerapan prinsip tersebut sejauh ini terhambat oleh beberapa faktor, seperti terkait minimnya kontribusi pemerintah lokal, rendahnya komunikasi pemerintah dengan aktor lainnya, tidak aktifnya pokdarwis, keberadaan pelaku wisata lain yang belum tersinergikan, hingga terkait masalah keaktifan organisasi pengelola desa wisata itu sendiri.

c. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut. Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal.

Dalam hal kepemilikan lokal, objek wisata pemandian air panas ini memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk bekerja disana khususnya bagi masyarakat suku piliang soni. Adapun bentuk kepemilikan lokal yang ada di pemandian air panas ini berupa terserapnya tenaga kerja untuk objek wisata ini. Saat ini tenaga kerja yang terserap belum banyak. hal ini disebabkan oleh belum banyaknya jumlah pengunjung. Namun pada saat hari libur, pengelola objek wisata dapat memperkerjakan tenaga kerja lebih banyak karena jumlah pengunjung pada saat hari libur meningkat.

Adanya objek wisata ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk membuat usaha, seperti tempat minum/makan bagi pengunjung dengan harga yang kompetitif. Yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan objek wisata pemandian air panas ini adalah pengelola objek wisata belum ada mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan objek wisata.

Sunaryo (2013:78) menjelaskan bahwa usaha-usaha wisata sebagai fasilitas penunjang kepariwisataan seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama dengan masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Lebih lanjut Sunaryo (2013:78) juga memaparkan bahwa keterkaitan antara swasta (pelaku-pelaku usaha) pariwisata dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut. Berdasarkan paparan tersebut maka indikator ketercapaian dari prinsip kemitraan kepemilikan lokal menurut Sunaryo meliputi adanya kemitraan dalam pengelolaan wisata dan adanya upaya bersama dalam pengembangan dan pemeliharaan usaha fasilitas penunjang wisata. Prinsip kemitraan kepemilikan lokal dalam penyelenggaraan Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang terlihat jelas dari berbagai kemitraan dan kerjasama yang dilakukan oleh desa wisata bersama sejumlah pihak swasta atau pelaku usaha pariwisata yang ada. Meskipun dalam prakteknya penerapan prinsip tersebut masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebermanfaatannya ataupun dampak dari adanya kemitraan belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa wisata pada umumnya.

d. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteriakriteria dan standar-standar internasional. Penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan pada objek wisata pemandian air panas ini tidak dilakukan secara berlebihan. Bahkan kondisi alam di sekitar lingkungan objek wisata terpelihara dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari suasana ketika memasuki objek wisata ini. kemudian diperkuat dengan adanya sikap konsisten pengelola untuk memelihara objek wisata ini.

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Maka dalam pelaksanaannya, hendaknya para pengelola objek wisata dalam hal ini yaitu kelompok masyarakat Suku Piliang Soni harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu.

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteriakriteria dan standar-standar internasional.

Penyelenggaraan Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang secara keseluruhan telah memenuhi prinsip pemanfaatan sumber daya secara berlanjut. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kedua desa wisata dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang digunakannya dengan tanpa mengesampingkan faktor keberlanjutan, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam, manusia, budaya dan minat khusus, hingga sumber daya modal. Hambatan yang dihadapi lebih terkait dengan masalah internal sumber daya manusia organisasi desa wisata, terkait keterbatasan modal yang dimiliki oleh desa wisata itu sendiri, dan terkait pemanfaatan sumber daya budaya yang masih terkotak-kotak.

e. Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

Untuk mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, pengelolaan objek wisata pemandian air panas ini menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan pengunjung. Bagi pengunjung yang datang ke objek wisata ini akan mendapatkan pelayanan yang sangat baik. hal sederhana yang dapat ditemukan adalah sikap ramah pengelola terhadap pengunjung yang datang. Keramahan dari pengelola ini membuat pengunjung tetap merasa nyaman berada di objek wisata ini. Dilihat berdasarkan aspek manajemennya, pengelolaan objek wisata ini secara umum belum memiliki perencanaan yang baik.

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan dan masyarakat setempat dapat terwujud. Dalam hal pengembangan objek wisata pemandian air panas ini perlu adanya kerjasama antara kelompok masyarakat yang mengelola saat ini (Suku Piliang Soni) dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

Prinsip mengakomodasi aspirasi masyarakat meskipun telah diterapkan namun masih kurang optimal. Adapun penerapan prinsip tersebut terhambat oleh keaktifan masyarakat setempat dalam menyampaikan aspirasinya yang masih tergolong rendah, dimana aspirasi masih banyak terhenti pada akar rumput dan belum tersalurkan sepenuhnya sampai pada pengelola Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang ataupun aktor pembuat kebijakan.

f. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*). Daya dukung pengembangan pariwisata ini juga melibatkan Akademisi, Media massa, Sawsta serta komunitas. Atau dalam istilah *Pentahelix*.

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*). Daya dukung dan kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Berdasarkan daya dukung objek wisata pemandian air panas ini memiliki kapasitas lahan yang laik. Lahan yang digunakan sebagai areal pemandian tepat berada disebelah sungai batang Tabalui. sehingga menambah daya tarik orang untuk berwisata di sini. Berdasarkan keterangan pengelola objek wisata, status kempilikan lahan lokasi objek wisata pemandian air panas ini merupakan tanah ulayat suku paliang soni dibawah pimpinan Datuk Pakomo.

Daya dukung lainnya yaitu kondisi alam yang masih sangat asri dan sejuk dan dapat dinikmati oleh pengunjung yang datang berkunjung. Daya dukung lainnya yaitu lingkungan sosial masyarakat yang sangat ramah. Bagi pengunjung yang datang ke objek wisata ini akan merasakan secara langsung keramahan masyarakat sekitar dan pengelolannya. Daya dukung dari segi akses cukup baik meskipun masih terdapat jalan yang belum diaspal dan berbatu.

Prinsip daya dukung lingkungan pada Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang telah sesuai dan terpenuhi. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kondisi fisik, biotik, sosioekonomi, dan kondisi budaya dalam mendukung penyelenggaraan desa wisata dan melibatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat. Selain itu dalam kegiatan wisata yang diselenggarakan pun tidak melampaui ambang batas dari kapasitas lokal serta daya dukung lingkungan Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang itu sendiri.

g. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal. Dalam pengelolaan objek wisata pemandian air panas ini, ada proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara internal oleh pengelola. Namun pedoman evaluasi yang mengacu kepada standar-standar untuk tingkat nasional, regional maupun internasional belum ada. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan objek wisata air panas masih berskala lokal. Adapun hal – hal yang dievaluasi meliputi jumlah kunjungan wisatawan, keuangan, pelayanan terhadap pengunjung, serta perawatan dan pemeliharaan.

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, aspek monitor dan evaluasinya menjadi ranah dari peran DPRD Lembaga ini berperan dalam pengawasan kinerja Pemerintah dalam pengembangan pariwisata sesuai dengan konsep-konsep yang direncanakan

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan sekali sebulan. Hasil evaluasi ini dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan objek wisata pemandian air panas dimasa mendatang. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, dampak keberadaan objek wisata pemandian air panas ini berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak ini diharapkan dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan menjadi lebih baik lagi sehingga manfaat keberadaan objek wisata ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang masih sangat terbatas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pihak pengelola objek wisata pemandian air panas Desa Sungai Pinang ini perlu membuat standar-standar terkait proses monitor dan evaluasi. Hal ini dirasa penting karena untuk menentukan langkah pengembangan objek wisata ke depannya diperlukan data yang valid. Pihak suku Piliang Soni dapat meminta bantuan atau berkolaborasi dengan pemerintah desa, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang focus di bidang kepariwisataan, dan pihak lain yang dianggap kompeten.

Ketercapaian prinsip monitoring dan evaluasi program dalam penyelenggaraan Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang disesuaikan dengan teori Good Tourism Governance dinilai masih belum optimal. Terdapat upaya untuk memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Desa Wisata oleh beberapa pihak berdasarkan pada pedoman-pedoman sederhana. Akan tetapi dalam prakteknya penyelenggaraan Desa Wisata belum sepenuhnya termonitor dan terevaluasi secara intensif. Penerapan prinsip tersebut secara keseluruhan terhambat oleh minimnya pendataan kegiatan Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang yang dapat dilaporkan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk aktif terlibat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata, masih sederhananya pedoman yang digunakan, dan kegiatan pengawasan oleh pemerintah

Kabupaten belum secara khusus merujuk pada masing-masing kampung melainkan masih dilakukan secara general.

h. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan peanggung gugat atas segala tindakan kebijakan yang diterapkannya. Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Pada objek wisata pemandian air panas ini, perencanaan yang sudah dibuat akan mengakomodir kesempatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan adanya perencanaan yang memperhatikan kesempatan bekerja bagi masyarakat lokal akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar objek wisata pemandian air panas ini. Selain itu, dalam hal pemanfaatan sumberdaya seperti tanah, air dan udara tidak dilakukan secara berlebihan, sehingga kelestarian alamnya dapat terjaga. Dengan adanya perencanaan yang memperhatikan kedua hal ini maka akuntabilitas dalam pengelolaan objek wisata pemandian air panas dapat diwujudkan. Selain pihak pengelola, hal ini membutuhkan bantuan dan partisipasi dari banyak pihak antara lain dukungan dari pemerintah setempat, masyarakat, pengunjung/wisatawan dan lain-lain.

Ketercapaian prinsip tersebut secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam kaitannya dengan poin kebermanfaatan bagi kualitas manusia dan lingkungan masyarakat, khususnya menyangkut kebermanfaatan sosial dan ekonomi, penyelenggaraan Desa Wisata masih belum mampu memberikan pengaruh yang besar dan luas untuk masyarakat sekitar. Hal tersebut terhambat oleh belum adanya pondasi yang kokoh dan jaringan kerjasama yang luas dalam penyelenggaraan Desa Wisata, sehingga aktivitas wisata yang dilakukan oleh Desa Wisata sendiri masih sangat minim. Disamping itu masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan Desa Wisata masih terbatas pada masyarakat tertentu.

i. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan professional. Materi pelatihan yang diberikan sebaiknya meliputi topic tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan/tempat menginap, serta topic-topik lain yang relevan.

Pada objek wisata pemandian air panas Desa Sungai Pinang ini, berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak pengelola (Kelompok Masyarakat Suku Piliang Soni) belum pernah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan pariwisata. Hal ini dikarenakan status pihak pengelola yang belum jelas dan masih bersifat individual. Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pihak pemerintah pernah melaksanakan pelatihan terkait kepariwisataan dengan sasaran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah resmi dibentuk.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara koordinasi yang lebih intens antara pihak pengelola objek wisata saat ini dengan pihak-pihak lain yang terkait. Salah satu pihak yang dapat membantu dalam hal pelatihan serta pembinaan pengembangan objek wisata yang berkelanjutan yaitu pihak perguruan tinggi. Secara keseluruhan prinsip pelatihan terhadap

masyarakat terkait telah terlihat dari adanya berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan masyarakat terkait kepariwisataan yang telah diselenggarakan pada Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang. Adapun program pendidikan dan pelatihan pada Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang diselenggarakan baik itu oleh pemerintah maupun pihak swasta. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, meliputi: kegiatan dari pemerintah yang cenderung digeneralisasikan, tidak adanya indikator penilaian hasil ataupun capaian program di masyarakat, hingga masalah terkait kegiatan yang belum dilakukan secara berkala berkelanjutan

j. Promosi

Dalam hal promosi, objek wisata pemandian air panas sudah melakukannya. Promosi yang dilakukan berupa penyeban informasi melalui media sosial seperti facebook, Whatsapp, Instagram dan lain-lain. Disamping itu, promosi objek wisata ini disampaikan dari mulut ke mulut. Sejauh ini ada beberapa stakeholder yang ikut serta melakukan promosi. Stakeholder tersebut berupa instansi pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung. Hasil yang diterima setelah dilakukan promosi belum menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan. Promosi ini masih belum optimal dan perlu ada pembenahan cara melakukan promosi tersebut. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pengetahuan dan wawasan terkait strategi promosi objek wisata yang efektif dan efisien.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut. Promosi pariwisata secara formal menjadi peran dari pemerintah dan masyarakat. Prinsip promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan belum sepenuhnya diterapkan. Pada penyelenggaraan Objek Wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang, penerapan prinsip masih terhambat oleh upaya promosi yang ada namun minim dilakukan, media promosi seperti website yang belum dioptimalkan, dan terbatasnya kerjasama dengan pihak swasta ataupun pelaku wisata lokal dalam kaitannya dengan upaya melakukan promosi bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tantangan terkait sumberdaya manusia dalam proses menuju pariwisata yang berkelanjutan pada objek wisata Pemandian Air Panas Desa Sungai Pinang ini masih sangat besar. Hal ini dapat dilihat pada aspek pariwisata berkelanjutan yaitu partisipasi, keikutsertaan para pelaku/stakeholder involvement, kepemilikan lokal, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan dan promosi yang masih terkendala pada aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan objek wisata yang masih bersifat individu yaitu oleh 1 kelompok masyarakat (Suku Piliang Soni) serta kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain yang terkait. Harapan untuk pengembangan objek wisata ini adalah adanya keputusan yang jelas terkait pihak pengelola, dengan tujuan pihak pengelola mendapatkan akses informasi mengenai bantuan pendanaan pengembangan pariwisata, pelatihan dan hal terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2019). Buku RPJMDes Desa Sungai Pinang: Profil Desa Sungai Pinang.
- Arida, I.N.S. (2021). Buku Ajar: Pariwisata Berkelanjutan. Sustain-Press
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Darjosanjoto, E.T.S. (2012). Penelitian Arsitektur Di Bidang Perumahan dan Permukiman. Itspress. Surabaya
- Dessler, G. (2015). Management of Human Resources: The Essentials (4th Edition). Pearson Canada, Ontario.
- Herdiansyah, H (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
- Kallmuenzer, A., Baptista, R., Kraus, S., Ribeiro, A. S., Cheng, C. F., & Westhead, P. (2021). Entrepreneurs' human capital resources and tourism firm sales growth: A fuzzy-set qualitative comparative analysis. *Tourism Management Perspectives*, 38, 100801.
- Pradana, F.D. (2017). Skripsi: Kajian Pengembangan Desa Wisata di Desa Blimbing Kabupaten Bondowoso. Bandung: Sekolah Tinggi Destinasi Pariwisata Bandung.
- Rahma, P. D., & Primasworo, R. A. (2017). Identifikasi Potensi & Masalah Desa Sidomulyo Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata di Kota Batu. *Reka Buana: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia*, 2(1), 89-97.
- Ranawiajaya, Ida B.F. (2018). Skripsi: Kajian Terhadap Kebijakan Kepariwisata Dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals) tahun 2030. Denpasar: Fakultas Hukum UNUD.
- Sidiq, S. S. (2019). Potensi Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-12.
- Saridi, S., Novianti, E., Rizal, E., Astuti, B. N. Y., Hadian, M. S. D., & Wulung, S. R. P. (2021). Implementasi Pariwisata Berkelanjutan: Indikator Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal di Plataran Borobudur (RESORT & SPA). *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 3(2), 62-67.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23-35.
- Setijawan, A. (2018). Pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam perspektif sosial ekonomi. *Jurnal Planoearth*, 3(1), 7-11.
- Soeratno dan Lincoln A. (1993). Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Suwena, I. K. dan Widhiatamaja. I.G.N. (2017). Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Yoeti. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta: PT. Perca